

POLICY BRIEF

PASIR PANJANG VILLAGE, ARUT SELATAN DISTRICT

"Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province



COLLABORATION BETWEEN

Assosiation for Women in Small-Micro Business Assistance (ASPPUK)

AND

PKTL KLHK (Forestry Planning and Environment and Forestry) – Central Kalimantan Province Government - Kotawaringin Barat Regency Government

2022

SUPPORTED BY:

UNDP-GEF

POLICY BRIEF

Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur Regency, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province
KLHK-UNDP-GEF Project

“Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan”

**Pasir Panjang Village, Arut Selatan District,
Kotawaringin Barat Regency,
Central Kalimantan Province**

**Disusun oleh :
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro
(ASPPUK)**

2022



Ringkasan

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu daerah sangat tergantung dari pembangunan manusianya. Salah satu alat ukurnya adalah tingkat indeks pemberdayaan gender. Provinsi Kalimantan Tengah menduduki rangking pertama secara nasional dinilai dari indeks pemberdayaan gender (IDG). Walaupun secara total nilai IDG Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 82,41%, namun Kabupaten Kotawaringin Barat masih menduduki peringkat ke 13 dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, terendah setelah Kabupaten Seruyan, yaitu 64,54%. Pembangunan manusia dalam hal ini Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih jauh dari harapan. Artinya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih rendah.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di desa sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender di dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi semakin nyata, dibutuhkan. Untuk itu, pengelolaan sumber-sumber ekonomi desa mesti dibarengi pula dengan perbaikan pembangunan kesehatan ibu dan anak, pendidikan serta kondisi sosial kelompok perempuan dan anak khususnya, serta masyarakat umumnya. Dimana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dapat memberikan kesejahteraan dan terjadi perbaikan serta peningkatan pendapatan keluarga serta perbaikan posisi dan kondisi kepemimpinan perempuan di akar rumput, terutama didalam pengelolaan ekonomi lokal.

Salah satu lokasi sasaran proyek Kalimantan Forest (Kalfor) UNDP kerjasama Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) adalah Desa Pasir Panjang, yang berada di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Jarak tempuh ke ibukota kabupaten 6 Km dengan menggunakan sepeda motor selama 45 menit.

Total jumlah penduduk sebesar 11.481 jiwa, dimana penduduk perempuan berjumlah 5.615 jiwa serta penduduk laki-laki berjumlah 5.866 jiwa.

Desa Pasir Panjang adalah desa urban multi etnis. Etnis dominan adalah Jawa, kemudian Melayu lalu Dayak, Batak, Madura, Sunda, Betawi, Flores, Bugis, Tionghoa dll. Berbagai macam etnis menghuni desa ini. Tingkat keberagaman etnis ini mendorong terjadinya transformasi pengetahuan dan keterampilan dengan cepat sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduknya.

Dukungan para pihak sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan desa yang berada di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain). Oleh karena itu, political will dibutuhkan dari pemerintah untuk memfasilitasi melalui dukungan program dan anggaran. Fasilitasi sebuah forum multipihak secara partisipatif untuk pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta berperspektif gender, diperlukan. Kebutuhan diatas berjalan secara paralel dengan pemberdayaan dan pendampingan terhadap proses kegiatan ekonomi yang telah berjalan sejak lama di Desa Pasir Panjang yang dimotori oleh perempuan.

Pendahuluan

Salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah ketidaksetaraan gender dan sosial yang menyebabkan munculnya eksklusi sosial dan gender. Manfaat dari program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum dapat dinikmati secara adil dan setara, khususnya oleh perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Oleh karenanya, upaya inklusi gender menjadi sangat penting untuk memastikan kesuksesan suatu program.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, mendorong pengintegrasian perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender agar menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam upaya meningkatkan pembangunan lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di setiap level pembangunan mulai dari tingkatkelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Melalui pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) melaksanakan Proyek Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan di Kalimantan (Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan) atau KalFor Project, dimana salah satu lokasi yang menjadi target adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan salah satu mitra penerima hibah proyek berjudul Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province, yang memiliki tujuan untuk menciptakan para local champion khususnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan responsive gender, inovatif, kreatif dan transformative di tingkat desa melalui pengelolaan sumber daya ekonomi alternatif untuk keberlanjutan hidup.

Melalui Proyek ini diharapkan para Local Champion atau kader-kader penggerak perubahan sosial ekonomi di tingkat kelurahan/desa aktif memimpin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi desa secara berkelanjutan dan turut mendukung tujuan besar proyek untuk membangun penguatan perencanaan pengelolaan hutan dalam menyelamatkan dan menjaga hutan (di luar kawasan hutan) beserta jasa ekosistem dan keanekaragamannya yang bernilai tinggi, pada suatu kesatuan lanskap dari dataran rendah sampai pegunungan di pulau Kalimantan. Manfaat proyek ini diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan dalam perkebunan untuk mendukung secara global pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan yang memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati serta mitigasi perubahan iklim.

Tujuan

Policy Brief ini merupakan dokumen hasil analisis terhadap isu strategis dan kebijakan yang dikembangkan dari hasil temuan di lapangan melalui kegiatan assessment, pendampingan, pelatihan, lokakarya/FGD/ diskusi-diskusi yang dilakukan ASPPUK selama menjalankan proyek.

Tujuan dari pembuatan Policy Brief ini adalah:

1. Untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) kepada para stakeholder yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan/ membuat keputusan
2. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama kepada pemerintah desa/kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap isu-isu strategis yang ada
3. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan para Pemangku Kebijakan terkait isu-isu yang berkembang di Desa Pasir Panjang

Asppuk dalam mendukung ASPPUK dalam Mendukung Pemberdayaan Local Champion di area sekitar hutan

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan organisasi jaringan di tingkat nasional yang memiliki 44 NGO anggota, berada di 20 provinsi, memiliki 77 Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro (JARPUK) yang berada di level kota/kabupaten, memiliki 1528 Kelompok Perempuan Usaha Kecil Mikro (KPUK) ditingkat desa, mendampingi kurang lebih 2 juta perempuan usaha kecil mikro dan memiliki 33 Lembaga Keuangan Perempuan (LKP). ASPPUK memiliki visi terwujudnya perempuan usaha kecil mikro yang kuat, mandiri, setara dan berkeadilan gender serta inklusi.

ASPPUK sebagai organisasi yang focus pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, memiliki keahlian, pengalaman dan modalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis usaha melalui pendekatan;

(1) Pengintegrasian nilai-nilai 3 P (people, planet, profit) dalam pengembangan bisnis, dimana pengembangan model bisnis yang dikembangkan tidak saja mengejar keuntungan (profit) semata namun juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Planet) dan menghormati hak asasi manusia (people), dimana bisnis yang dijalankan harus dapat memenuhi hak-hak pekerja dan tidak melanggar HAM

(2) Pengintegrasian bisnis responsive gender, dimana bisnis yang dijalankan harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam rantai nilai usaha, mengembangkan kebijakan bisnis yang ramah perempuan dan anak, mengembangkan SOP anti kekerasan seksual ketika menjalankan bisnis, memberlakukan pembagian peran adil gender, memberdayakan kaum perempuan yang hidup disekitar area usaha atau bisnis yang dijalankan dan lain-lain

(3) Pendekatan bisnis komunitas atau bisnis berbasis sumber daya local, dimana pendekatan ini dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada komunitas Bahan baku produk yang dikembangkan diambil dari keunggulan dan ciri khas yang ada di daerah tersebut, tidak mendatangkan bahan baku dari luar, namun memanfaatkan sumber daya local secara berkelanjutan, arif dan bijaksana.

ASPPUK telah memberdayakan Local Champion dan masyarakat khususnya perempuan dan kaum muda di lokasi sasaran proyek melalui serangkaian kegiatan seperti melakukan assessment awal di setiap desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, melakukan ToT Kepemimpinan Sosial Ekonomi Perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Kepemimpinan Sosial EKonomi di tingkat desa, melakukan pendampingan yang terdiri dari bisnis mentoring dan coachong, diskusi rutin, pelatihan pemasaran, pelatihan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam, bantuan bibit usaha, pendampingan untuk pengurusan NIB, HAKI, PIRT dan membangun kolaborasi dengan para stake holder.

Pengembangan Bisnis/ Usaha Komunitas di Desa Pasir Panjang

Selama pendampingan (Technical Assistance), ASPPUK melakukan mentoring dan coaching bisnis dengan mengembangkan bisnis/usaha komunitas untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari penduduk di komunitas pedesaan/pedalaman (termasuk masyarakat/suku asli) dengan cara meningkatkan pendapatan dan kemampuan komunitas melalui proses produksi dan pemasaran yang adil dari produk-produk unggulan desa/tempat mereka sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada diwilayahnya.

Pengembangan usaha komunitas ini berdasarkan atas sumberdaya / Potensi yang ada diwilayah setempat, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi matapencaharian alternatif maupun eksisting untuk masyarakat desa. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya atas kekayaan alam namun sumberdaya manusia pun menjadi perhitungan utama sebagai pengelola yang bijak untuk mengelola sumberdaya / potensi yang ada tersebut.

Produk yang didorong sebagai unggulan atau identitas dari Local Champion dalam menjalankan dan mengembangkan Usaha Komunitas berdasarkan mapping dan perengkingan sumberdaya / potensi local yang ada di desa/kelurahan lokasi sasaran proyek.

Akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dapat dikelola sebagai sumber ekonomi masih berpegang teguh pada adat istiadat dayak Tomun, sejak dulu telah memberikan akses dan kontrol kepada perempuan untuk mengelola kebun dan sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah. Pengelolaan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan menjadi bagian peran perempuan untuk dikelola menjadi obat- obatan tradisional untuk kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki. Sementara laki- laki, berperan pada pengelolaan hutan dan kayu. Untuk pencarian bahan baku usaha terutama rotan dan pandan hutan dilakukan berdua namun lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

sumber perekonomian desa yang digunakan sebagai mata pencaharian utama di Desa Pasir Panjang terdiri dari :

- Kehutanan : Hasil hutan bukan kayu seperti Bruta, Rotan dibuat aneka gelang dan cincin, Purun bahan untuk membuat tas dan tikar, Akar kuning, Kalalawit, Pasak bumi dibuat untuk minuman atau jamu tradisional mengobati berbagai jenis penyakit
- Pariwisata : Areal bekas penyimpanan tiga buah lumbung padi yang disebut dengan jurung tiga dijadikan tempat wisata seluas \pm 40 Ha. Berdekatan dengan lokasi Orang Utan Foundation International. Disana masih terdapat berbagai jenis kayu hutan, anggrek hutan, flasma nufah, monyet, bekantan, beruang dan anggrek hutan
- Pertanian : Jagung, Cabai, Bawang merah, Tomat, Sawi, Mentimun, Buncis, Terong, Bayam, Kacang tanah dan Kacang panjang
- Peternakan : ayam pedaging dan petelur, babi, sapi dan bebek
- Aliran anak sungai di APL yang dijadikan sebagai tempat permandian air hitam
- Pariwisata : Anggota Pokdarwis yang bergabung dalam pengelolaan lokasi pariwisata Jurungtiga milik pribadi seluas \pm 40 ha menyajikan aneka jenis pohon hutan, bunga, herbal dan spot lain yang disediakan untuk menarik pengunjung

Mengapa ini penting?

Masih terjadi kesenjangan gender terhadap perempuan dan anak muda yang hidup di area sekitar hutan, diantaranya minimnya keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi yang ada di desa, terbatasnya akses dan kontrol perempuan dan anak muda terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi, minimnya kapasitas dan keterampilan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis usaha, kepemimpinan yang lemah, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sehingga perempuan dan anak muda tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, masih adanya hambatan-hambatan social budaya yang menyulitkan perempuan maupun anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di tingkat desa.

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan.

Kesenjangan Gender akan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, memperburuk ketimpangan pembangunan, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan menghambat pencapaian tujuan SDGs, yaitu tujuan ke 1; Mengakhiri kemiskinan, tujuan ke 5; Mencapai kesejateraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan tujuan ke 8; Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Prinsip SDGs “no one left behind” menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan dalam pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global pembangunan yang disepakati seluruh anggota PBB . Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan SDGs yang diturunkan dalam 17 Tujuan serta 169 Target. Yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam menterjemahkan komitmen ini adalah dengan integrasi yang erat dengan program Nawa Cita pemerintah hingga tertuang secara konkrit dalam Rencana Kerja Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi wujud komitmen tersebut.

Isu-Isu Gender dan Kepemimpinan Perempuan untuk mendukung Pencapaian SDGs

Ketersediaan bahan baku untuk produk usaha unggulan seperti anyaman dan jamu tradisional terancam punah

Anyaman dan Jamu tradisional dapat menjadi produk unggulan Desa Pasir Panjang. Keterampilan telah dimiliki oleh sebagian kecil perempuan di desa Pasir Panjang, namun mereka menghadapi tantangan dimana bahan baku bisnis yang dijalankan terancam punah karena tidak dapat dibudidayakan. Menjaga kelestarian habitat bahan baku untuk jamu (kayu kuning) dan anyaman (Purun, Bruta) mendesak dilakukan.

Minimnya kesadaran masyarakat tentang pengembangan desa sadar wisata

Pemahaman masyarakat tentang konsep wisata masih sebatas tentang pemandangan dan penataan suatu lokasi layak kunjung, belum mengintegrasikan dan dikembangkan menjadi wisata kuliner, kerajinan, budaya serta desa ramah anak dan perempuan.

Lemahnya Jaringan Pasar

Perempuan di desa banyak yang bisa membuat kerajinan gelang dan cincin dari bahan rotan bruta, keripik singkong, keripik pisang, membuat kue basah, kue kering, pengrajin topi dari kulit kayu, menganyam tikar pandan, anyaman keranjang, budidaya madu kelulut, seni ukir kayu, kerupuk basah, herbal dan jamu tradisional.

Perempuan di Desa Pasir Panjang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Namun mereka belum paham strategi pasar yang mesti dikembangkan. Saat ini sebagian kecil dari mereka, telah melakukan penjualan secara online melalui facebook dan whatsapp., khususnya untuk produk tas, cicncin dan gelang dari bahan bruta. Harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan pembuatan dan ketersediaan bahan baku. Jaringan pasar yang sudah tersedia mulai dari kalangan anak sekolah, kuliah, karyawan dan ibu rumah tangga. Tak jarang pembeli dari Kota Pangkalan Bun, Palangka Raya, Banjarmasin dan Lampung. Kualitas produknya sudah cukup bagus dan rapi, walaupun diakui bahwa pengembangan motif masih menjadi kendala. Saat ini produk yang dijual masih menggunakan motif lama, kotak atau persegi. Perempuan pelaku usaha dilibatkan saat adanya pameran dan ekspo yang biasa dilaksanakan di kabupaten, serta kegiatan-kegiatan ekspo lainnya untuk mendukung wisata.

Tantangan yang dihadapi pelaku usaha, biasanya terkait dengan harga. Rendahnya penawaran atau harga beli, sementara biaya pengiriman mahal. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya produksi dan menurunnya pendapatan. Tak jarang perempuan menghentikan produksi atau hanya menjual ke pasar yang jaraknya tidak jauh dari kabupaten.

Minimnya bantuan program, kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil mikro

Partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan diwakili oleh PKK. Usulan kelompok perempuan diluar PKK misalnya kelompok perempuan pelaku usaha kecil mikro tidak dapat terakomodir. Perwakilan perempuan dalam hal ini pengurus PKK, biasanya hadir untuk menyiapkan konsumsi rapat. Informasi penting dalam proses pembangunan desa dan alokasi dana desa tidak menjadi konsen utama mereka. Tantangan yang dihadapi perempuan sehingga enggan untuk menghadiri rapat desa adalah sering sekali usulan mereka tidak masuk dalam daftar prioritas musrenbang. Keberadaan 2 orang perempuan dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa, tidak cukup mempengaruhi dan menguatkan pentingnya usulan kegiatan perempuan masuk dalam daftar musrenbang.

Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Kelurahan Kotawaringin Hilir diantaranya;

- Menjaga kelestarian habitat bahan baku untuk jamu (kayu kuning) dan anyaman (Purun, Bruta) mendesak dilakukan
- Perlunya program dan strategi pengembangan industri rumahan yang diarahkan untuk penguatan desa wisata dengan memfasilitasi kelompok-kelompok sadar wisata yang terintegrasi dengan konsep wisata kuliner, kerajinan tangan lokal, agro wisata, dan wisata dengan konsep desa yang ramah lingkungan, memperhatikan kearifan lokal serta responsif gender. Diperlukan pemahaman yang sama tentang konsep wisata terpadu.
- Mengintegrasikan isu GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan inklusivitas) dalam mendukung Pembangunan Desa utamanya di wilayah-wilayah APL, diantaranya dalam membuat Grand Design program-program pemerintah ataupun swasta lainnya agar lebih memperhatikan nilai-nilai Gender, Disabilitas dan Inklusi
- Memberikan ruang kepada seluruh elemen masyarakat baik Pemangku kepentingan, Perempuan, Anak Muda, Disabilitas dalam pembangunan / pengembangan sebuah Kawasan
- Mengalokasikan anggaran, kegiatan dan program bagi pemberdayaan dan penguatan Kepemimpinan Local Champion sebagai Agen / Kader Perubahan Pembangunan Sosial-Ekonomi yang berperspektif Gender dan Berkelanjutan di wilayah APL
- Mendorong kemajuan Usaha Komunitas yang telah di rintis oleh Local Champion
- Memfasilitasi terbukanya jaringan pemasaran yang luas bagi perempuan pelaku usaha kecil mikro untuk menjamin keberlanjutan usaha dari matapencaharian alternatif karena selama ini produk-produk industri rumahan memiliki keterbatasan jangkauan konsumen dan wilayah pemasaran
- Mendorong terciptanya mata pencaharian alternatif untuk membantu memulihkan kondisi sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari hutan(kayu). Studi yang dilakukan ASPPUK diberbagai daerah dampingan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga akan menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan jika hanya bertumpu pada aktivitas dari hutan dan perikanan saja, karena sumberdaya terus mengalami penipisan. Untuk bisa bertahan dan meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga, dibutuhkan inovasi dalam mengembangkan strategi-strategi ekonomi yang beragam di luar sektor hutan dan perikanan.

